

Judul : Film lokal sulit tayang di bioskop, legislator sarankan perbaikan regulasi
Tanggal : Jumat, 10 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Film Lokal Sulit Tayang Di Bioskop Legislator Sarankan Perbaikan Regulasi



Novita Hardini

ANGGOTA Komisi VII DPR Novita Hardini menyoroti isu terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang kian memprihatinkan. Jumlah layar tidak sebanding dengan pesatnya produktivitas karya anak bangsa dalam industri perfilman nasional saat ini. Fenomena antrean panjang pemutaran film sudah berada pada tahap merugikan.

Novita menjelaskan kerugian yang dialami para kreator industri film Tanah Air bukan hanya secara ekonomi, tapi juga psikis. Banyak film berkualitas antre berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan jatah tayang beberapa hari. Itu terjadi karena mereka harus bergantian dengan film lain.

Kondisi itu tidak manusiawi bagi produser film yang sudah berinvestasi besar dalam berkarya. Kondisi ini membutuhkan percepatan distribusi layar ke daerah, agar akses penonton tidak hanya terpusat di kota besar. "Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru," ujarnya, kemarin.

Jika regulasinya tidak segera dibenahi, Indonesia dikhawatirkan cuma jadi pasar bagi film luar negeri saja. Masyarakat hanya akan terus jadi penonton di rumah sendiri meski industri ini bisa dikuasai anak bangsa. Ditambah, film merupakan salah satu identitas bangsa yang harus terus didukung negara.

Novita juga menyoroti hambatan struktural yang tengah dihadapi oleh industri perfilman nasional. Salah satu isu krusial yakni persoalan PPN ganda. Skema perpajakan ini sangat membebankan para pelaku in-

dustri kreatif perfilman di seluruh wilayah Indonesia.

Pengenaan PPN tingkat produksi serta pajak distribusi menciptakan beban ganda yang terus menggerus margin keuntungan sineas. "Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi mereka sudah terbebani PPN ganda. Ini adalah bentuk disinsentif nyata bagi seluruh kreativitas," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR Samuel Wattimena menilai, penayangan film masih sepenuhnya berbasis pada negosiasi pasar. Dalam sistem itu, film yang diminati akan terus diputar, sedangkan film yang kurang laku akan cepat tersingkir. Jika tidak ada kebijakan dari Pemerintah, kondisi ini berpotensi merugikan film nasional.

Untuk itu, Samuel mengusulkan agar Pemerintah membuka ruang diskusi terkait kemungkinan penerapan kuota wajib penayangan film nasional. Ini merupakan bentuk afirmasi dari negara terhadap karya anak bangsa. Selanjutnya, industri perfilman bisa tetap berada dalam kerangka bisnis yang mengejar keuntungan secara ekonomi.

Sebagai pelaku bisnis, dia memahami, sulit memaksakan penayangan film yang tidak laku. Namun, semua pemangku kepentingan harus mencari jalan tengah bersama untuk mencapai keadilan. "DPR ingin mendorong adanya keseimbangan antara mekanisme pasar dan keberpihakan terhadap industri film nasional," kata Samuel.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengingatkan, ekosistem yang adil adalah kondisi yang tidak merugikan pihak mana pun. Kebijakan perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap film nasional. Ini demi kemajuan industri perfilman yang tengah berkembang sangat pesat.

Kata dia, dalam menjalankan sistem ekonominya, Indonesia menganut pendekatan yang tidak sepenuhnya kapitalistik maupun sosialis. Karena itu, negara perlu hadir untuk menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pasar. ■ PVB